

PARTISIPASI ORGANISASI SOSIAL LOKAL DALAM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

(Studi di Kelurahan Rijali dan Waihaong Kota Ambon)

Alit Kurniasari

ABSTRAK

Organisasi lokal di Kelurahan Rijali dan Waihaong Kota Ambon provinsi Maluku dapat berfungsi sebagai self help organization, yang selanjutnya didayagunakan dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Organisasi lokal yang ada di kedua kelurahan berkolaborasi untuk mengatasi permasalahan sosial yang mendesak ditangani. Dengan segala kendala dan potensi yang dimiliki seperti kehidupan beragama serta budaya pelagandong yang masih tersisa mampu mempererat kolaborasi organisasi atau kelompok, dengan membentuk Forum atau Kelompok Kerja. Perbedaan latar belakang agama (Islam & Kristen) memotivasi kedua kelurahan untuk bangkit dari keterpurukan pasca kerusuhan. Prinsip kolaborasi seperti kesetaraan dan transparansi dalam forum tetap dijalankan. Pengelolaan masalah keluarga pra sejahtera, dengan menggunakan pendekatan partisipatif mulai dari pendataan, assesment sampai pada perencanaan program, pelaksanaan pemberdayaan, dilakukan melalui Forum bentukan masyarakat. Sambil terus berkoordinasi baik secara vertikal maupun horizontal. Pemerintah dalam hal ini berfungsi sebagai fasilitator, pengendali dan evaluator terhadap pelaksanaan program. Agar program kerja mencapai hasil optimal maka pendekatan bottom up dengan memfasilitasi aspirasi dari akar rumput, menciptakan kepercayaan (trust) diantara keduanya perlu diciptakan. Pendampingan secara profesional perlu dilakukan terutama selama proses pelaksanaan program pemberdayaan berlangsung.

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Departemen Sosial pada dasarnya merupakan pelaksanaan amanat UUD 1945 yang diarahkan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. UU No 6 tahun 1974, diantaranya menyatakan bahwa masyarakat berkesempatan seluas-luasnya untuk mengadakan usaha kesejahteraan sosial (UKS) dengan tetap mengindahkan garis-garis kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan. Semangat masyarakat untuk menyelenggarakan UKS sosial perlu mendapat dukungan. Dalam hal ini masyarakat tidak dapat melakukannya secara perorangan namun perlu mengorganisir ke dalam suatu kelompok atau melalui organisasi sosial. Data Pusdatin (2005) menunjukkan bahwa terdapat 17.620 buah Organisasi Sosial yang bergerak dalam bidang UKS dan terdaftar di Departemen Sosial. Organisasi sosial dimaksud telah berbadan hukum dan melaksanakan usaha kesejahteraan sosial. Namun ditengah masyarakat perkotaan

maupun pedesaan, tidak sedikit ditemukan kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan pada bidang pelayanan sosial. Seperti kelompok-kelompok yang didasari oleh agama maupun kekerabatan, dikelola untuk memecahkan masalah-masalah sosial melalui kegiatan sosial. Kegiatan kelompok bisa berupa mengatasi kematian warga, gotong royong membantu anak yatim, mengintensifkan pengajian dan membantu anggotanya mengatasi masalah keluarga pra sejahtera atau anak-anak terlantar.

Semangat berkelompok dan nilai sosial budaya yang mengikat kelompok, memunculkan kepedulian dan jiwa saling menolong terhadap masyarakat yang kurang beruntung. Kemampuan dan kemauan sebagai kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing kelompok perlu diberi kesempatan lebih luas lagi dalam penanganan masalah yang ada disekitarnya. Jika kelompok tersebut dikonstruksi berlandaskan faktor budaya dari lingkungan seperti kepercayaan serta berdasarkan aspek sosial berupa peran yang mempengaruhi perilaku dalam rangka pemenuhan kebutuhan,

maka kelompok atau paguyuban pada tingkat komunitas akan memberi pengaruh pada kehidupan masyarakat setempat. (Tony, 2003). Kelompok dimaksud selanjutnya dapat disebut sebagai organisasi lokal, yang merupakan aktualisasi dari kelembagaan sosial. Jika kekuatan kelompok dapat berkolaborasi dan diarahkan untuk penyelenggaraan program UKS di wilayah sekitar, maka kegiatan kelompok menjadi lebih optimal, sekaligus penanganan masalah menjadi lebih efektif. Kondisi ini menjadi modal sosial dan selanjutnya dapat berperan sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

B. Permasalahan

Keberadaan organisasi sosial lokal yang banyak berkembang di wilayah setempat, pada kenyataannya langsung dapat dimanfaatkan bagi masyarakat yang membutuhkan. Misalnya kelompok-kelompok agama, secara langsung mampu memberikan pemenuhan kebutuhan spiritual bagi anggota masyarakat sekitarnya, sambil tetap memberikan penyantunan terhadap anak dan keluarga pra sejahtera. Kelompok dimaksud telah berfungsi sebagai wadah bagi anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Namun permasalahannya kelompok-kelompok tersebut masih bekerja secara sendiri-sendiri dengan sasaran yang sama menyebabkan kurang optimal dan tidak efektifnya kelompok dalam menangani masalah. Seandainya organisasi lokal mampu berkolaborasi dalam melaksanakan pelayanan UKS, maka masyarakat dapat memperoleh pelayanan secara komprehensif dengan hasil yang optimal. Dalam upaya menciptakan kolaborasi maka langkah awal perlu mengetahui "bagaimana kegiatan dan bentuk pelayanan apa yang dilakukan oleh masing-masing organisasi lokal ?, selain itu perlu diketahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan organisasi lokal ? Selanjutnya perlu diketahui cara yang dapat dilakukan organisasi lokal untuk meningkatkan partisipasinya dalam penanganan masalah ?"

C. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan partisipasi organisasi sosial lokal dalam penanganan masalah sosial di

wilayah sekitar. Secara rinci tujuan dimaksud adalah :

1. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh organisasi lokal.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi sosial lokal dalam kegiatan pelayanan.
3. Mengetahui upaya organisasi sosial lokal berpartisipasi pada penanganan masalah sosial di sekitarnya.

D. Manfaat

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi:

1. Pemerintah daerah Provinsi Maluku maupun bagi Kota Ambon, sebagai bahan perumusan kebijakan tentang pemberdayaan organisasi sosial lokal.
2. Organisasi sosial, sebagai bahan penyadaran atas permasalahan sosial dan potensi yang dimiliki untuk berperan pada pembangunan kesejahteraan sosial.

E. Metodologi

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan data kualitatif dilengkapi data kuantitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Provinsi Maluku, dengan lokus di tingkat kelurahan. Dipilihnya Provinsi Maluku khususnya Kota Ambon, kelurahan Waihaong dan Rijali, karena kedua lokasi tersebut mewakili wilayah berpenduduk mayoritas muslim dan kristen. Dipilihnya lokasi di Kota Ambon sebagai upaya mendukung terbitnya Inpres RI No. 6 tahun 2003, tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan di Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara pasca konflik. Khususnya pada bidang politik dan keamanan dengan melakukan program sosialisasi dan peningkatan kesadaran budaya hukum dan wawasan kebangsaan. Kegiatan dilakukan melalui revitalisasi dan pemberdayaan organisasi sosial kepemudaan desa dan organisasi sosial lainnya.

Unit kasus adalah organisasi sosial lokal dengan kriteria yaitu a) merupakan perkumpulan masyarakat, b) bentuk informal/formal, c) melakukan kegiatan UKS. Sumber

informasi diperoleh dari Pengurus Organisasi, aparat pemerintahan Kota/Kabupaten/Kelurahan serta Tokoh Masyarakat.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, observasi, dan penelusuran dokumen. Teknik analisa data dilakukan dengan teknik analisa kualitatif, disandingkan dengan teori yang ada kemudian dibandingkan dan dideskripsikan. Data kuantitatif dihubungkan dengan data kualitatif yang ditelusuri.

II. KERANGKA KONSEP

A. Organisasi Sosial Lokal

Organisasi sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan UKS. (Kep Mensos RI no 40 tahun 1980). Dalam pedoman Klasifikasi Orsos/LSM menyebutkan bahwa Organisasi sosial adalah lembaga yang didirikan oleh masyarakat secara swadaya yang bergerak dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat bidang UKS serta telah tercatat di instansi sosial dalam wilayah kerjanya.

Menurut Korten, Karamoy dan Dias dalam Edi (1997), organisasi sosial lokal sering disebut kelompok kemasyarakatan (*community group*) oleh Bank Dunia; atau disebut organisasi pedesaan (*rural organization*) dan oleh FAO; organisasi rakyat (*people's organization*) oleh UNDP disebutkan organisasi kemasyarakatan (*community organization*). Sedangkan UNDP mendefinisikan organisasi rakyat sebagai "*democratic organization that represents of their members and are accountable to them. They are formed by people who know each other, or who share a common experience, and their continued existence does not depend upon outside initiative or funding*".

FAO membedakan organisasi sosial lokal dalam dua tipe, yaitu: 1) *semi govermental organization* (organisasi semi pemerintah); dan 2) *self-help organization* (organisasi swadaya masyarakat). Karakteristik *self help organization* yang dimaksud yaitu: a) dibentuk dan atau didukung oleh masyarakat sendiri, bukan oleh pihak luar atau pemerintah dengan pendekatan

bawah-atas (*bottom-top approach*); b) keorganisasiannya lebih bersifat informal atau paguyuban; c) tujuan-tujuannya bersifat fleksibel; d) ketua dan anggotanya lebih banyak kelompok lapisan bawah yang didasari oleh hubungan interpersonal; e) aktivitasnya berkaitan dengan kegiatan dan kebutuhan sehari-hari para anggotanya.

Sebagaimana diketahui bahwa tumbuh kembangnya organisasi sosial dapat mengalami berbagai kendala baik yang berasal dari dalam (*internal*) maupun dari luar (*external*). Kendala *Internal* dapat disebut sebagai hambatan, rintangan bahkan ancaman yang datang dari tubuh organisasi sosial itu sendiri, berupa:

1. Hambatan Struktural ;

- a) Hakekat organisasi sosial yang non profit, tidak meraih simpatik dan dukungan masyarakat.
- b) Organisasi sosial yang tumbuh dari lingkungan orang-orang yang peduli, umumnya kekurangan dana, daya dan kemampuan politisi.
- c) Organisasi sosial berfungsi sebagai tempat mencari nafkah bukan tempat pengabdian dan pengorbanan bagi pengurusnya.
- d) Ketidaktersediaan sumber tetap untuk mendukung operasional organisasi sosial.

2. Hambatan Operasional ;

- a) Kurangnya pengenalan terhadap berbagai peraturan organisasi sosial, seperti UU maupun peraturan perUU tentang organisasi sosial.
- b) Kualitas pemimpin yang kurang mendukung.
- c) Pembagian kerja yang kurang memadai diantara pelaksana.
- d) Kurangnya tenaga pelaksana baik dalam jumlah maupun kualitasnya.
- e) Kurangnya dana dan peralatan yang memadai.
- f) Kurangnya hubungan dan komunikasi yang efektif, baik ke dalam maupun keluar.

- g) Kelemahan administratif baik secara umum maupun teknis, berupa pencatatan, pelaporan yang dapat digunakan untuk publikasi dan kehumasan.
 - h) Kurangnya pembinaan lanjut dan evaluasi terhadap perkembangan organisasi sosial.
3. Hambatan fungsional
- a) Sulitnya pengurus menterjemahkan gagasan dan cita-cita idealnya dalam suatu konsepsi operasional yang praktis.
 - b) Sulitnya pengurus memelihara kesinambungan antara kepentingan organisasi dengan kepentingan para individu pengurus dan anggotanya.
 - c) Lemahnya kemampuan membina sikap profesional dari anggota yang masih amatir.
 - d) Ketidadaan tenaga manajemen, tenaga pelaksana profesional dan tenaga administratif yang dapat diandalkan.

Sementara itu kendala *external*, terjadi dari dua sisi karena timbulnya tantangan-tantangan baru berupa masalah-masalah kesejahteraan sosial yang berkembang dan adanya penyalahgunaan Organisasi dan Usaha kesejahteraan sosial, misalnya sebagai tempat mencari nafkah.

B. Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Pembangunan Kesejahteraan Sosial bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Diselenggarakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan integrasi sosial melalui peningkatan ketahanan sosial dalam tata kehidupan dan penghidupan bangsa di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Poldas Pembangunan Kesejahteraan Sosial, Kep.Mensos RI Nomor 25/HUK/2003; Balatbangsos, Jakarta, 2003). Bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan dan penghidupan yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha dan memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, baik perorangan, keluarga, kelompok dan

komunitas masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia serta nilai sosial budaya setempat.

Ruang lingkup Pembangunan Kesejahteraan Sosial mencakup upaya: 1) Menumbuhkan kembangkan kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab sosial masyarakat, termasuk dunia usaha; 2) Penggalan dan peningkatan potensi dan sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan 3) Pelembagaan sistem kesejahteraan sosial nasional. Dalam hal ini pembangunan kesejahteraan sosial pada kebijakan pola operasional Depsos, diantaranya adalah: Pemberdayaan Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat.

Fungsi pembangunan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan melalui Usaha Kesejahteraan Sosial; yang mencakup pada kegiatan:

1. Pencegahan, mencakup kegiatan mencegah timbul, meluas, serta kambuhnya permasalahan Kesejahteraan Sosial dalam kehidupan perorangan, keluarga, kelompok, dan komunitas masyarakat.
2. Rehabilitasi, merupakan proses refungsionalisasi dan pementapan taraf Kesejahteraan Sosial untuk memungkinkan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) mampu melaksanakan kembali fungsi sosialnya dalam tata kehidupan dan penghidupan bermasyarakat dan bernegara.
3. Pengembangan, merupakan upaya pemeliharaan dan peningkatan taraf Kesejahteraan Sosial para PMKS melalui penggalan dan pendayagunaan potensi dirinya.
4. Penunjang, merupakan fungsi pendorong dan pendukung yang turut menentukan keberhasilan pembangunan nasional.

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dipahami bahwa hakekat pembangunan kesejahteraan sosial yang dimaksud merupakan upaya peningkatan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat yang memiliki harkat dan martabat, dimana setiap orang mampu

mengambil peran dan menjalankan fungsinya dalam kehidupan. Keempat fungsi pembangunan kesejahteraan sosial dimaksud mencakup upaya pemberdayaan dan perlindungan sosial melalui peningkatan kemampuan, kesadaran dan tanggung jawab sosial untuk berperan aktif dalam tata kehidupan dan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Midgley dalam Adi (2002) menyebutkan batasan kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi sosial dan bukan sekedar kegiatan amal ataupun bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Sebagai suatu kondisi kesejahteraan sosial dapat dilihat dari 3 (tiga) unsur utamanya, yaitu (a) sampai dimana tingkatan (derajat) permasalahan sosial yang ada di masyarakat dapat dikelola, (b) seberapa banyak kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dan (c) seberapa besar kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup dapat diperluas pada berbagai lapisan masyarakat.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial secara luas, pada hakekatnya adalah sebagai upaya peningkatan kualitas kesejahteraan sosial baik pada perorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat agar memiliki harkat dan martabat, di mana setiap orang mampu mengambil peran dan menjalankan fungsinya dalam kehidupan. Paradigma kesejahteraan itu adalah : (1) paradigma *residual*; (2) paradigma *institusional* dan (3) paradigma *developmental*. Dari paradigma tersebut Elliot, menekankan bahwa pembangunan sosial (*developmental*) pada intinya bersifat proaktif, menghindari '*victim blaming*' dengan melakukan perencanaan preventif guna mengembangkan dan memberdayakan berbagai potensi yang ada di masyarakat serta melakukan strategi intervensi (perubahan sosial terencana) yang bersifat multi sistem atau multi level yaitu pada tingkat mikro, mezo, makro. Seperti juga Gray (1997) dalam Adi ((2002) menggambarkan tentang level pembangunan (*level of development*) sosial menjadi empat level. Keempat level tersebut adalah :

Pembangunan pada tingkat mikro (*individual level*) ini lebih bersifat *rehabilitatif* dan *remedial* (penyembuhan) dimana fokus penanganan pada individu atau keluarga yang bermasalah. Fungsi ini diperlukan, terutama untuk mereka yang perlu mendapatkan bantuan

dengan segera. Usaha kesejahteraan sosial yang dilakukan masyarakat bisa berasal dari organisasi non pemerintah yang memfokuskan pada intervensi terhadap individu dan keluarga ataupun kelompok kecil yang berada di lingkungan tersebut. Tetapi juga bisa berasal dari individu-individu di masyarakat tersebut yang secara bersama-sama membentuk organisasi sosial guna menangani permasalahan di tingkat mikro yang ada di masyarakat.

Pembangunan pada tingkat Mezzo (*community level*). Pembangunan dilakukan di level organisasi dan komunitas, dimana pelaku perubahan mencoba mengembangkan program yang bersifat preventif, proaktif dan kreatif bersama masyarakat melalui pengembangan masyarakat (*Community Development*) dengan pendekatan pelayanan masyarakat (*Community Service Approach*) dan pendidikan masyarakat (*Community Education*). Pembangunan pada tingkat ini dilakukan melalui perubahan di tingkat organisasional. Pembangunan mengarah pada peran sebagai *entrepreneur*, yaitu peran pelaku perubahan dalam menyediakan beberapa bentuk layanan yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada masyarakat dunia industri, penyediaan layanan ini dikaitkan juga dengan biaya yang harus dibayar masyarakat.

Pembangunan di tingkat makro (*national level*). Pada dasarnya pembangunan di level normatif, dimana agen perubahan berusaha melibatkan diri pada upaya perencanaan dan pembuatan kebijakan sosial. Pembangunan lebih diarahkan pada bagaimana seorang pakar kesejahteraan sosial berusaha mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan di level yang lebih makro dari komunitas lokal, sehingga warna proses perencanaan dan pembuatan kebijakan yang dilahirkan tidak bersifat instruktif, sentralistik dan otoriter. Tetapi lebih mengarahkan pada pembuatan kebijakan yang lebih memperhatikan unsur partisipasi publik, desentralisasi dan demokratis.

Pembangunan di tingkat global (*international level*). Pendekatan ini menitikberatkan pada peran agen perubahan (*Agent of Change*) dalam mempengaruhi kebijakan di tingkat antar negara. Misalnya dalam agenda pengembangan partisipasi masyarakat dan

pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) baik pelaku perubahan pada organisasi pemerintah dan organisasi non pemerintah keduanya berusaha aktif terlibat dalam beberapa pertemuan dan studi perbandingan antar negara. Masing-masing agen perubahan tidak hanya berusaha untuk dapat mempengaruhi kebijakan di tingkat nasional tetapi juga mempengaruhi perubahan di tingkat internasional.

Berdasarkan ESCAP tujuan pembangunan sosial pada dasarnya adalah untuk membangun dan mengembangkan taraf hidup manusia, dengan pendekatan pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*). Pendekatan tersebut pada dasarnya berupaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memfokuskan pada pemberdayaan dan pembangunan manusia.

C. Partisipasi Orsos dalam Pembangunan Kesos

Organisasi sosial sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan UKS, perlu memiliki kemampuan, kemauan dan diberi kesempatan untuk berperan serta dalam pelayanan sosial. Pengertian partisipasi dalam hal ini sebagai keterlibatan diri atau masyarakat/komunitas tidak semata secara fisik namun secara psikologis (emosional) yang mendorong kesadaran disertai tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama dari kelompok. Partisipasi berperan sebagai alat (*instrumental*) pada pelaksanaan program agar menjadi efisien. Dalam konteks sebab akibat dari logika efisiensi menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat berdampak positif terhadap suatu program dan sebaliknya program menjadi positif bila ada partisipasi masyarakat. Pendekatan partisipasi terhadap kegiatan proyek adalah untuk menjawab kebutuhan yang dinyatakan oleh masyarakat dan atas permintaan masyarakat setempat. Partisipasi akan lebih efektif jika inisiatif datang dari masyarakat sendiri, sehingga dalam partisipasi masyarakat terkandung unsur kemampuan swadaya dari kelompok masyarakat yang dengan kesadaran dan inisiatif sendiri berupaya untuk memenuhi kebutuhan bersama yang sekaligus dapat memandirikan masyarakat (*social sustainable*).

Partisipasi organisasi sosial lokal dilakukan melalui proses keterlibatan aktif setiap anggota mulai dari perencanaan program, pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan serta melakukan evaluasi. Jika proses ini dapat berlangsung maka setiap anggota masyarakat dapat menikmati hasilnya atas suatu usaha perubahan yang terencana, sehingga tujuan tercapai. Selanjutnya program akan berdampak positif dan menjadi lebih efisien dan efektif sebaliknya masyarakat setempat menjadi lebih bertanggung jawab dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan.

Partisipasi masyarakat melalui kelompok, bisa berupa pikiran, tenaga/waktu dan sarana material lainnya ataupun kemauan berupa minat dan sikap. Untuk itu masyarakat perlu diberi kesempatan agar dapat memotivasi untuk berpartisipasi dalam program pembangunan kesejahteraan sosial.

Konsep peran serta atau partisipasi masyarakat memiliki prinsip inisiatif dari masyarakat (komunitas), dikerjakan oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat tidak dimanipulasi lagi oleh Pemerintah. Mengawali proses keterlibatan masyarakat, maka pendekatan berdasarkan pada kebutuhan yang dirasakan (*felt need*) oleh masyarakat perlu dilakukan. Selanjutnya berupaya mengembangkan keterlibatan warga sebanyak mungkin dalam upaya memecahkan masalah kebutuhan yang mereka rasakan. Karakteristik taktik dan teknik perubahan yang dilakukan adalah melalui konsensus, komunikasi antar kelompok dan kelompok kepentingan dalam masyarakat, serta diskusi kelompok. Apabila kebutuhan sudah dapat dirasakan oleh masyarakat, maka akan mendorong masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut untuk menggali dan mengaktualisasikan kebutuhan riil (*real need*) karena telah menjadi kekuatan internal dalam pembangunan masyarakat.

Selain itu perlunya mengidentifikasi potensi, masalah dan kebutuhan pembangunan, meliputi: (a) kualitas dan kuantitas potensi sosial, (b) Permasalahan sosial dalam pembangunan masyarakat, (c) kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya permasalahan sosial, (d) tingkat kebutuhan dasar masyarakat.

Setelah memahami potensi yang ada, maka selanjutnya dapat mengkondisikan masyarakat untuk secara bersama-sama memahami: (a) berbagai permasalahan sosial yang menonjol, (b) menyusun urutan prioritas masalah yang harus segera ditangani, (c) memahami potensi dan sumberdaya sosial yang dapat dimanfaatkan dalam program pembangunan masyarakat. Selama proses berlangsung sebenarnya telah berkembang kesadaran dan persepsi masyarakat tentang sistematisasi dan kerangka logis proses terjadinya (*causality*) antar masalah yang ada serta menumbuhkan upaya mengatasi permasalahan.

Dengan menciptakan jejaring kelembagaan kolaboratif maka kegiatan organisasi lokal menjadi lebih efektif, yaitu dengan mengembangkan kelembagaan-kelembagaan tersebut. Sistem jejaring kolaboratif yang terbentuk pada prinsipnya harus mampu menjalin hubungan berdasarkan prinsip kesetaraan diantara organisasi yang ada, dengan tetap mempertimbangkan mekanisme sistem lokal yang berlaku. Dalam pengembangan jejaring antar lembaga secara kolaboratif, memiliki prinsip-prinsip (a) berdasarkan aktifitas di tingkat komunitas, (b) informal, (c) kesetaraan, (d) mengutamakan keikutsertaan semua pihak, (e) komitmen, (f) sinergi, (g) mengembangkan relasi horizontal dan vertikal, (h) sarana mengembangkan kesadaran kritis. Dengan prinsip-prinsip tersebut jejaring akan mampu mengkombinasikan fungsi-fungsi yang diperlukan bagi penyelesaian masalah komunitas melalui pertukaran informasi, pengalaman dan pengetahuan serta penyediaan sumber daya yang berasal dari tingkat komunitas, maupun tingkat di atasnya. Oleh karena itu, dalam upaya peningkatan mutu kehidupan komunitas, diperlukan kesediaan atau kerelaan pihak-pihak lain untuk melibatkan diri sesuai dengan fungsinya masing-masing. Forum yang diadakan merupakan forum kemitraan, bukan milik satu *stakeholder* semata. Tidak ada sub ordinasi artinya forum ini forum kesetaraan. Untuk kelancaran forum diperlukan sekretariat yang berfungsi menggambarkan potensi, aktivitas, realitas dan permasalahan, termasuk deskripsi kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat.

Dengan demikian partisipasi masyarakat merupakan alat efektif untuk memobilisasi sumber-sumber setempat dalam melaksanakan

suatu program. Berbagai hambatan perlu dipertimbangkan bila saja partisipasi masyarakat dalam melaksanakan program berkurang, seperti (1) terjadinya penolakan internal kalangan anggota masyarakat, (2) hambatan-hambatan *structural*, berupa status sosial, jenis kelamin dan umur. Sebagai suatu metode, maka faktor pendukung dalam partisipasi masyarakat seperti motivasi tetap diperlukan dan fungsi pemerintah adalah untuk memobilisasi sumber-sumbernya.

III. KERANGKA MODEL TEORITIS

Pembangunan Kesejahteraan Sosial secara luas, pada hakekatnya adalah sebagai upaya peningkatan kualitas kesejahteraan sosial baik pada perorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat agar memiliki harkat dan martabat, dimana setiap orang mampu mengambil peran dan menjalankan fungsinya dalam kehidupan. Pembangunan kesejahteraan sosial dapat dilakukan melalui level institusional atau level Mezo, yaitu melalui organisasi sosial (lokal).

Sebagai pelaku perubahan, kemampuan, kemauan yang dimiliki organisasi lokal perlu diberi kesempatan lebih berperan serta dalam pelayanan sosial. Agar hasilnya efektif maka masing-masing organisasi lokal (lokal) perlu berkolaborasi. Dengan memperhatikan hubungan berdasarkan prinsip kesetaraan diantara organisasi yang ada, sambil tetap mempertimbangkan mekanisme pada sistem lokal yang berlaku. Dalam hal ini penting dilakukan pendekatan partisipatif. Teknik yang digunakan dari pendekatan ini berawal pada kebutuhan yang (*felt need*) oleh masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan warga sebanyak mungkin dalam upaya memecahkan masalah kebutuhan yang riil. Apabila kebutuhan, masalah dan potensi masyarakat telah teridentifikasi, selanjutnya perlu diketahui kondisi yang menyebabkan terjadinya permasalahan sosial. Taktik dan tehnik yang dilakukan melalui konsensus, komunikasi antar kelompok dan kelompok kepentingan dalam masyarakat, serta diskusi kelompok.

Kondisi ini akan menjadi kekuatan internal, karena organisasi lokal dengan kemampuan, kemauan yang dimiliki telah diberi kesempatan untuk terlibat dalam salah satu unsur pembangunan kesejahteraan sosial yaitu

mampu mengelola permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat sekitarnya. Manfaat yang diperoleh tidak semata secara fisik namun secara psikis dan sosial akan mendorong kesadaran disertai tanggung jawab untuk mencapai tujuan bersama. Jika diskemakan terlihat sebagai berikut:



Pembangunan kesejahteraan sosial pada tingkat mezo, dapat dilakukan melalui organisasi sosial lokal. Dalam hal ini, organisasi sosial lokal perlu berkolaborasi serta dilakukan dengan pendekatan partisipatif dalam mengelola permasalahan yang dihadapi masyarakat. Semua ini menjadi kekuatan internal masyarakat, untuk melaksanakan kegiatan pelayanan sosial sehingga hasilnya menjadi optimal, efisien dan efektif.

IV. HASIL PENELITIAN

Kecamatan Sirimau Kelurahan Rijali dan Waihaong berada di kota Ambon. Kelurahan Rijali berpenduduk 3.332 jiwa terdiri dari 1.556 laki-laki dan 1.777 perempuan. Berdasarkan dari segi usia penduduk cukup merata jumlahnya, walaupun yang paling banyak berusia antara 15- 30 tahun (1.519 jiwa) disusul oleh penduduk berusia dibawah 0-14 tahun (921 jiwa). Latar belakang pendidikan mayoritas adalah SLTA, dengan latar belakang pekerjaan dalam sektor informal pada bidang jasa, dagang dan tukang ojek. Mayoritas penduduknya beragama Kristen Protestan yaitu sebanyak 2.564 jiwa. Kelurahan Waihaong berpenduduk 6.235 jiwa terdiri dari 3.087 laki-laki dan 3.148 perempuan. Tingkat pendidikan cukup merata dari tingkat SD, SLTP, dan SLTA, dengan mata pencaharian mayoritas adalah swasta, sebagai pedagang (163 jiwa) disusul sebagai nelayan (120 jiwa) dan PNS (107 jiwa). Jika dibandingkan dengan Kelurahan Rijali,

maka Kelurahan Waihaong penduduknya lebih banyak yang memiliki pekerjaan tetap. Mayoritas penduduknya beragama Islam yaitu sebanyak 6.038 jiwa.

Kehidupan kemasyarakatan di Ambon, dilatarbelakangi oleh budaya *pelagandong*; (pela artinya persatuan atau persahabatan antar warga dari dua desa atau negeri dan gandong artinya sekandung). Kehidupan masyarakat sebelum kerusuhan saling menghormati dan mengasihi, tolong menolong (*baku masuk*). Walau berbeda agama dan suku mereka saling membantu (*masohi*) baik berupa dana, tenaga dalam pembuatan rumah ibadah maupun saling berkunjung dalam perayaan hari besar. Demikian juga halnya kumpul-kumpul (*panasbela*) mampu merekatkan antar desa yang tergantung pada keputusan desa. Walaupun diakui oleh beberapa informan bahwa budaya tersebut, sudah mulai luntur terlebih setelah terjadinya kerusuhan, seperti timbulnya rasa curiga diantara warga berlainan agama.

Kehidupan serta permasalahan penduduk yang cukup dinamis, serta lokasinya sangat dekat dengan pusat awal terjadinya kerusuhan yaitu Batu Merah. Organisasi keagamaan diwakili oleh kelompok Pengajian, Majelis Taklim, Kelompok Muhabat, Angkatan Muda. Sedangkan organisasi berbadan hukum diwakili oleh Yayasan Micromap. Kelompok masyarakat diwakili oleh PKK dan kelompok arisan. Kelompok pemuda diwakili oleh kelompok karang taruna.

A. Kegiatan organisasi dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Yayasan Micromap

Sebagai organisasi berbadan hukum, sejak tahun 2002 memiliki kegiatan mengembangkan dan memberdayakan sumber daya manusia dengan spesifikasi pada IPTEK. Namun juga memiliki program usaha kesejah-teraan sosial, yaitu pembinaan anak jalanan, melalui rumah singgah "Sinar Harapan". Selain itu memberdayakan keluarga nelayan miskin di pesisir kota Ambon serta di Pulau Anyu-Anyu, memberikan kartu bebas biaya berobat dan bantuan usaha ekonomis produktif bagi keluarga miskin.

Faktor pendukung organisasi ini yaitu adanya akses dengan instansi pemerintah seperti Depsos, Depkes serta Universitas Pattimura dan dengan LSM asing. Selain itu memiliki SDM yang memadai terutama dari pelatihan bagi pengurus dalam keterampilan *life skill*, pemetaan, pengelolaan keuangan, perencanaan program secara *bottom up* serta kemampuan pendampingan (*advocacy*) di lapangan. Kemampuan pendampingan seperti memperkuat nilai-nilai keagamaan dan merubah pola pikir pemuda dalam memandang agama dengan konsep kerukunan, kemampuan memotivasi pemuda untuk memanfaatkan bantuan dengan tidak mengharapkan bantuan semata serta kemampuan mengalihkan suasana *traumatic* dari masyarakat. Sumber dana diperoleh dari pemerintah, project pemetaan, akademisi, warga masyarakat dan LSM asing seperti CARDI dan World Vision.

2. Majelis Ta'lim Al Gufhron

Organisasi Majelis Taklim ini dibentuk pada tahun 2004 atas keinginan para kaum ibu Kelurahan Waihaong. Aktif dalam kegiatan keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya kaum ibu, anak-anak dan para muallaf. Tujuan perkumpulan ini diharapkan oleh pendirinya, dapat menarik masyarakat Islam untuk lebih mengetahui dan memahami agama yang dianutnya melalui berbagai kegiatan yang ada.

Kegiatan sosial yang dilakukan, seperti menyantuni anak yatim, kaum dhuafa, lansia, menyelenggarakan khitanan massal bagi anak kurang mampu dan santunan kematian bagi keluarga anggota Majelis Ta'lim.

Sumber dana diperoleh dari anggota pengajian dan donatur tetap. Keberhasilan organisasi dalam melaksanakan kegiatan tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak seperti unsur masyarakat, aparat kelurahan, organisasi lain, seperti Bhayangkari selain dari pimpinan dan partisipasi peserta

pengajian yang hampir diikuti oleh kaum perempuan di kelurahan Waihaong.

Kendala yang dihadapi organisasi untuk mewujudkan kegiatan yaitu terbatasnya sumber dana, kemampuan ekonomi masyarakat, khususnya untuk menyantuni fakir miskin dan warga masyarakat yang menjadi korban kerusuhan. Dana yang tersedia tidak sebanding dengan korban kerusuhan beragama Islam dan permasalahan sosial lainnya, yang diketahui oleh Majelis Ta'lim.

3. Kelompok Muhabet Pengasih

Kelompok ini terbentuk sejak tahun 1953, berawal dari kumpulan rutin beribadah diantara warga di wilayah Rijali. Bertujuan untuk melayani warga masyarakat yang mengalami musibah kematian. Misinya adalah untuk meringankan dan membantu orang yang sedang mengalami musibah kematian. Jumlah anggota saat ini 158 orang. Kegiatan yang dilakukan tidak terbatas pada pemberian santunan kematian maupun menolong bagi warga yang terkena musibah, namun juga melakukan dukungan moril bagi keluarga yang mengalami korban kerusuhan. Perhatiannya terhadap keluarga kurang mampu, khususnya pada anggota Muhabeth cukup besar. Diketahui bahwa masih terdapat 10% dari jumlah anggota Muhabeth adalah keluarga prasejahtera.

Perannya pada saat terjadi kerusuhan, perkumpulan ini mampu melindungi warga masyarakat yang menjadi sasaran perusuh, tanpa memandang perbedaan agama. Mereka berpandangan bahwa korban kerusuhan memerlukan dukungan lebih dibandingkan keluarga yang mengalami musibah kematian atau sakit.

Faktor pendukung kelompok ini adalah ikatan kekerabatan *Pelagandong* yang masih mewarnai serta faktor agama yang cukup kuat. Dukungan moral yang diberikan oleh kelompok ini mampu menenangkan warga masyarakat yang sedang dilanda musibah kerusuhan. Jangkauan kegiatan yang dilakukan

kelompok ini tidak terbatas bagi wilayah Rijali namun mampu menjangkau masyarakat atau keluarga yang berada diluar wilayah kelurahan. Jumlah anggota semakin meningkat seiring dengan banyaknya masyarakat yang membutuhkan.

Sumber dana selama ini mengantungkan pada iuran wajib anggota, sehingga faktor dana menjadi kendala dalam penanganan masalah yang dihadapi masyarakat sekitarnya. Jumlah dana tersedia tidak sesuai dengan jumlah korban kerusakan maupun warga masyarakat sekitar yang menjadi perhatian kelompok.

4. Kelompok Angkatan Muda

Kelompok ini sebagai ranting ke 14 dari kelompok Angkatan Muda Gereja, memiliki tujuan untuk memberdayakan pemuda-pemudi yang ada di lingkungan Rijali. Anggotanya berusia antara 17-45 tahun, berjumlah sampai 56 orang. Kegiatan kelompok tidak hanya menyelenggarakan kebaktian namun juga mengikutsertakan anggota dalam berbagai pelatihan ketrampilan. Pelatihan yang pernah diikuti seperti (1) kepemimpinan pemuda Gereja (PKPG); (2) keterampilan membuat kue; (3) membuka modal usaha ; (4) keterampilan tarik suara/menyanyi dan tari-tarian.

Walaupun dana menjadi kendala dalam penyelenggaraan kegiatan, akan tetapi kelompok mampu menyelenggarakan kegiatan dengan swadaya, berusaha mandiri dalam penyelenggaraan kegiatan. Potensi yang dimiliki yaitu mampu menampung pemuda sekitarnya dalam organisasi keagamaan, maupun pemberian kegiatan keterampilan. Mampu bekerja sama dalam berbagai penyelenggaraan kegiatan untuk meningkatkan kemampuan anggota.

5. Kelompok Arisan/PKK

Kelompok ini terdiri dari ibu-ibu sekitar Kelurahan Rijali dengan berbagai suku bangsa dan agama. Sebelum terjadinya kerusakan, kelompok ini

mampu menggalang berbagai kegiatan ibu-ibu di wilayahnya, meliputi pengelolaan dana bergulir, membantu kegiatan Posyandu, PIN maupun kegiatan tingkat kelurahan lainnya. Disamping itu aktif melakukan kegiatan sosial, seperti mengunjungi warga yang mengalami kesulitan atau musibah, maupun membantu ekonomi rumah tangga anggotanya. Sejak terjadi kerusakan kegiatan ini tidak dapat berlangsung lagi, mengingat beberapa warga masih dalam pengungsian. Potensi yang dimiliki dari kelompok ini adalah kepedulian pada warga yang mengalami masalah serta hubungan sosial atas dasar ketetanggaan yang dijalin oleh anggotanya masih tetap berlangsung, meskipun berada ditempat pengungsian. Kondisi pasca kerusakan belum memungkinkan warga muslim yang mengungsi menempati kembali rumahnya.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Kegiatan Organisasi Lokal

Beberapa faktor yang mendukung dan menghambat kegiatan organisasi lokal :

1. Faktor pendukung;

- a) adanya figur kepemimpinan kharismatik dari setiap kelompok, sebagai tokoh masyarakat maupun keagamaan. Sekaligus dapat mengikat anggotanya dalam kegiatan kemasyarakatan.
- b) kepedulian seluruh organisasi lokal terhadap berbagai permasalahan sosial sekitarnya, seperti terhadap anak-anak terlantar, pemuda pengangguran, wanita dan keluarga yang kurang beruntung, lansia. Dengan berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki untuk memberi dukungan moril maupun materil.
- c) Ikatan kekerabatan, hubungan ketetanggaan dan ikatan agama yang mewarnai organisasi lokal mampu mengikat perilaku warga masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan organisasi lokal.

- d) Adanya organisasi berbadan hukum yang memiliki jaringan luas dan sumber daya manusia yang cukup memadai bagi proses pendampingan.

2. Faktor penghambat dari organisasi;

- a) terbatasnya dana dan sarana, dimana target sasaran penanganan lebih besar daripada dana yang tersedia.
- b) Sikap mental yang dimiliki warga masyarakat, khususnya "orang Ambon" yang cenderung malas, masa bodoh, hidup konsumtif.

Faktor penghambat secara struktural yaitu :

- a) Terbatasnya data keluarga pra sejahtera.
- b) Lemahnya pengawasan atau monitoring terhadap pemberian bantuan bagi keluarga yang membutuhkan.
- c) Kurangnya tenaga pendampingan sehingga sulit memantau penggunaan bantuan dan pembinaan bagi keluarga pra sejahtera.
- d) Kondisi alam dan geografis, dengan penyebaran penduduk yang bermukim di pelosok yang sulit terjangkau pembinaan.
- e) Belum adanya pembinaan khususnya bagi organisasi sosial lokal.

C. Upaya Organisasi Sosial Lokal Berpartisipasi Terhadap Penanganan Masalah

Keterlibatan organisasi lokal, dalam penanganan masalah, perlu ditelusuri terlebih dahulu dari pemahamannya terhadap problematika sosial yang ada. Permasalahan apa yang paling dirasakan oleh warga masyarakat yang diwakili oleh organisasi lokal. Melalui diskusi kelompok antar organisasi lokal, diketahui bahwa permasalahan sosial yang banyak dihadapi oleh masyarakat yaitu ; masalah keluarga pra sejahtera, masalah pengungsi dan banyaknya pemuda yang menganggur, masalah pengungsi korban kerusuhan. Adapun kebutuhan yang paling dirasakan (*felt need*) berkaitan dengan

permasalahan yang akrab oleh hampir seluruh kelompok yaitu penanganan pada keluarga pra sejahtera. Masalah ini menjadi hal yang perlu ditangani, mengingat dampaknya akan turun temurun pada anak-anaknya. Sedangkan masalah korban kerusuhan dipahami sebagai masalah yang perlu penanganan secara menyeluruh dan berada di tingkat pemerintah. Sehingga masalah keluarga pra sejahtera menjadi prioritas utama karena dirasakan dan berada dekat dengan kehidupan mereka.

Dari hasil diskusi kelompok, diperoleh gambaran bahwa penyebab timbulnya masalah tersebut bersumber dari sikap mental warganya selain terbatasnya pendidikan serta keterampilan yang dimiliki oleh pemuda. Namun penyebab paling utama adalah faktor sikap mental, seperti hidup malas, gaya hidup konsumtif dari warga masyarakat. Sedangkan faktor pendidikan tidak menjadi penyebab utama, karena kenyataannya pendidikan tinggi tidak menjamin sikap mentalnya. Demikian juga halnya dengan kondisi kerusuhan bukan menjadi penyebab keluarga pra sejahtera, bisa saja tidak sejahtera sejak sebelum kerusuhan. Diyakini oleh tokoh masyarakat seandainya anggota masyarakat memiliki kemauan untuk bekerja, tidak konsumtif dalam kehidupan sehari-hari, maka keluarga tersebut tidak semakin hidup pra sejahtera.

Peran organisasi lokal selama ini masih bersifat sektoral dalam penanganan masalah, sehingga dinilai kurang efektif. Berbagai kendala ditangani sendiri-sendiri tanpa adanya saling mendukung, sehingga hasilnya menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, perubahan sistem pembinaan bagi penanganan keluarga pra sejahtera perlu segera dilakukan.

Melalui diskusi kelompok antar organisasi sosial lokal, memberikan saran untuk membentuk koordinator diantara organisasi sosial. Artinya membentuk sistem koordinasi diantara organisasi sosial maupun organisasi lokal. Sistem koordinasi yang dimaksudkan yaitu: melakukan koordinasi di tingkat instansi, kelembagaan dan di tingkat kelurahan. Artinya, bentuk koordinasi tersebut merupakan wujud kolaborasi organisasi sosial lokal. Dalam hal ini, koordinator di tingkat kelurahan, harus berasal dari masyarakat, bukan bentukan pemerintah. Dalam hal ini, masyarakatlah yang diberi kesempatan untuk mengelola dan menentukan kepengurusannya, sehingga perlu

dibedakan dengan LKMD. Hal tersebut diungkapkan bahwa LKMD adalah bentukan pemerintah, yang dinilai tidak mewakili kebutuhan masyarakat. Perubahan sistem pembinaan yang dimaksud, pada dasarnya bertujuan untuk merubah pola pikir sekaligus sikap mental penyandang masalah. Langkah-langkah yang disarankan kelompok yaitu :

1. Membentuk kelompok kerja; pemberian nama kelompok kerja tergantung pada kebutuhan masyarakat, misalnya: kelompok kerja ekonomi, karena masalah peningkatan ekonomi yang menjadi kebutuhan masyarakat.
2. Melakukan pendataan keluarga pra sejahtera; adapun petugas pendataan bisa dilakukan oleh anggota Karang taruna, PKK maupun PSM.
3. Melakukan *assessment*, untuk menggali keinginan dan kebutuhan masyarakat, sehingga dapat memberi sumbangan bagi perencanaan program apa yang sebenarnya dibutuhkan warga masyarakat, sehingga perencanaan berlangsung secara *bottom up*.
4. Melakukan pemberdayaan pada kelompok kerja melalui bimbingan pelatihan dan pemberian stimulan, termasuk memberikan pendampingan bagi penyandang masalah.
5. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan program, baik dengan tingkat vertikal maupun horizontal.
6. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja

Dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan beberapa faktor meliputi ;

1. Perlu adanya *trust* atau saling percaya. Kepercayaan akan timbul jika pelaksananya adalah orang-orang yang memiliki perasaan senasib dan adanya ikatan emosional diantara warganya. Hal ini hanya bisa berlangsung bila pelaksana adalah warga masyarakat pilihan yang sudah diketahui kredibilitasnya dan telah dipercaya. Seandainya tidak ada lagi kepercayaan maka pekerjaan yang akan dilakukan menjadi sia-sia.

2. Pelaksana kelompok kerja terdiri dari: Lurah sebagai koordinator, anggotanya RW-RT, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok masyarakat, kelompok agama, tokoh adat, tokoh perempuan. Dalam hal ini aparat pemerintah hanya berfungsi sebagai fasilitator dalam pelaksanaan program.
3. Pendampingan dapat dilakukan oleh LSM yang memiliki keahlian untuk itu terutama selama proses *assesment* maupun selama pelaksanaan melalui konseling.
4. Selalu melakukan koordinasi baik lintas sektoral antar organisasi dan aparat pemerintah setempat maupun secara vertikal dengan instansi pemerintah yang berwenang seperti Dinsos, ataupun dengan sumber-sumber lain yang dimiliki masing-masing organisasi lokal.

V. ANALISIS TEMUAN PENELITIAN

Dalam konteks pembangunan kesejahteraan sosial, organisasi sosial lokal yang eksis di kedua wilayah tersebut dapat disebut sebagai *self help organization*. Bentuk organisasi atas dasar kekeluargaan, suku, agama, maupun budaya yang eksis di kelurahan Rijali dan Waihaong telah berupaya memenuhi kebutuhan dan menangani masalah yang dihadapi, seperti menghadapi musibah kematian, maupun kerusakan yang secara tidak langsung berdampak pada kehidupan masyarakat. Sejalan dengan meningkatnya permasalahan yang dihadapi baik pada anak-anak terlantar sebagai korban kerusakan, maupun keluarga yang kurang beruntung, menuntut untuk melakukan kegiatan sosial selain kegiatan utama.

Kegiatan bernuansa agama seperti kelompok Majelis Ta'lim Al Gufron dan Angkatan Muda, serta kelompok atas kekerabatan yaitu Muhabeth dan hubungan ketetanggaan yang dijalin melalui kegiatan arisan maupun kelompok lainnya, telah mampu menggerakkan kelompok untuk peduli terhadap berbagai permasalahan yang ada di sekitarnya. Artinya kegiatan yang ditampilkan organisasi sosial lokal mampu memberikan pemenuhan

kebutuhan spiritual maupun sosial walau hanya sedikit yang menyentuh pada kebutuhan ekonomi. Terpenting dalam hal ini kelompok tersebut mampu melibatkan berbagai unsur dalam masyarakat, seperti kalangan pemuda, perempuan, agamawan dan budaya setempat. Kondisi ini menunjukkan bukan hanya kegiatan bersifat amal semata namun juga adanya tanggung jawab sosial masyarakat terhadap permasalahan yang dihadapi. Hubungan silaturahmi diantara anggota atas dasar hubungan kekerabatan, budaya pelagandong, kehidupan beragama menjadi potensi yang mempersatukan anggota masyarakat dalam suatu kegiatan.

Ditinjau dari segi fungsi, kegiatan yang dilakukan masih terbatas pada fungsi pencegahan (*Preventif*) terhadap masalah yang dihadapi masyarakat setempat. Walaupun penanganan masalah yang dilakukan masih bersifat sementara seperti membantu keluarga kurang mampu, anak terlantar dan keluarga yang terkena musibah seperti sakit, meninggal. Kenyataannya upaya yang dilakukan oleh masing-masing organisasi sosial lokal mampu meringankan masalah, yang dihadapi anggota masyarakat, agar tidak semakin terpuruk. Memahami potensi yang dimiliki organisasi sosial lokal, serta kebutuhan dasar dari masyarakat, maka selanjutnya dapat diberi kesempatan untuk menangani permasalahan yang dihadapi.

Berbagai kendala organisasi sosial lokal seperti terbatasnya dana dan sarana dalam pelaksanaan kegiatan, dapat dihadapi seandainya kegiatan dilakukan secara kolaborasi. Dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing organisasi sosial lokal, seperti adanya figur kharismatik dari masing-masing organisasi serta kekuatan internal lainnya. Seperti kekuatan yang telah terbangun melalui kepeduliannya ketika ada anggota masyarakat yang terkena musibah, mengalami keterlantaran. Selain itu memanfaatkan jaringan kerja yang telah terbangun dari organisasi berbadan hukum yang ada di wilayah tersebut.

Tanggung jawab sosial dan kemampuan swadaya dari kelompok selanjutnya dibangun menuju perubahan yang dilakukan melalui konsensus, diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok terungkap bahwa permasalahan

yang perlu segera ditangani adalah masalah keluarga pra sejahtera. Dari diskusi itu pula muncul pentingnya berkolaborasi diantara organisasi lokal yang ada, dengan tetap memperhatikan mekanisme yang telah berlangsung. Semua organisasi sosial lokal merencanakan langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam penanganan masalah. Langkah yang dimaksud seperti melalui pembentukan forum. Forum dimaksud berupa kelompok kerja yang disesuaikan dengan permasalahan yang akan ditangani. Langkah-langkah yang dilakukan mulai dari tahap pendataan, *assessment*, terhadap kebutuhan masyarakat yang melibatkan seluruh anggota organisasi lokal. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk pendekatan partisipatif dimana masing-masing organisasi lokal diberi kesempatan untuk berperan sesuai dengan kemauan dan kemampuan yang dimiliki. Agar semua aspirasi dan kemauan masyarakat termasuk penyandang masalah itu sendiri dapat terakomodasikan. Dalam proses selanjutnya perlu dilakukan pelatihan keterampilan sebagai modal dasar keluar dari masalahnya serta memberikan bantuan stimulan. Untuk hal ini Forum atau Kelompok Kerja tidak dapat melaksanakan sendiri namun perlu adanya keterlibatan tenaga profesional dari pemerintah maupun swasta atau dunia usaha untuk memonitor dan mendampingi keberlangsungannya. Peran pemerintah dalam hal ini berfungsi sebagai fasilitator, *controler* maupun teknis asisten.

Catatan dari analisis tersebut yaitu inisiatif yang muncul dari hasil diskusi kelompok, sebagai aspirasi yang muncul dari lapisan bawah, perlu diakomodasi kedalam perencanaan program penanganan fakir miskin diwilayahnya. Terpenting adalah dalam pelaksanaannya perlu melibatkan unsur pemerintah maupun sektor swasta lainnya seperti perguruan tinggi atau dunia usaha.

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

Partisipasi organisasi lokal dalam pembangunan kesejahteraan sosial, dapat berperan melalui pengelolaan masalah sosial yang ada di sekitarnya. Permasalahan yang dihadapi di Kelurahan Waihaong dan Rijali

adalah keluarga pra sejahtera. Bagaimana organisasi sosial lokal di kedua wilayah tersebut mengelola permasalahan, dapat diberi kesempatan untuk terlibat lebih banyak lagi. Dalam hal ini organisasi lokal perlu berkolaborasi. Kelompok keagamaan seperti Majelis Taqlim, Muhabeth, kelompok pemuda melalui Karang Taruna, Angkatan Muda, serta Yayasan Micromap dapat merencanakan program penanganan masalah secara bersama-sama. Kedudukan dari masing-masing kelompok perlu setara, dengan memegang teguh kejujuran dan transparansi serta berfungsi sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Bentuk kolaborasi yang disarankan adalah berupa kelompok kerja atau forum, yang benar-benar membentuk masyarakat bukan membentuk pemerintah. Dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai fasilitator atau berfungsi sebagai teknikal asistensi.

Penentuan program kegiatan dapat direncanakan terlebih dahulu melalui musyawarah bersama, dimulai dari pendataan dan assesment terhadap berbagai kebutuhan yang dirasakan keluarga pra sejahtera. Jika memahami penyebab keluarga pra sejahtera yang dikemukakan pada diskusi kelompok yaitu faktor mental atau sikap malas dan hidup konsumtif dari warga masyarakat, namun hal ini masih dilihat dari sudut pandang orang luar, sehingga perlunya memahami dari sudut pandang penyandang masalah itu sendiri. Oleh karenanya assesment terhadap keluarga pra sejahtera menjadi penting dilakukan. Sebagai pertimbangan untuk memberdayakan penyandang masalah. Dalam rencana pelatihan keterampilan dan pemberian stimulan tentunya perlu melibatkan pemerintah sebagai penyandang dana. Peran lembaga non pemerintah seperti LSM asing, dunia usaha atau perguruan tinggi berfungsi sebagai pendamping atau partner dalam pelaksanaannya. Fungsi pemerintah selain sebagai fasilitator, juga sebagai berperan sebagai pengendali dan evaluator bagi keberlangsungan pelaksanaan program.

B. Rekomendasi

Untuk melengkapi proses dimaksud, perlu mempertimbangkan beberapa rekomendasi berikut ini :

- a. Seiring dengan menjamurnya organisasi sosial dengan munculnya berbagai permasalahan sosial sebagai dampak dari kerusuhan, maka perlu dilakukan seleksi terhadap organisasi sosial yang menangani masalah keluarga pra sejahtera, anak terlantar maupun pengungsi. Khususnya organisasi sosial yang menangani keluarga pra sejahtera perlu diseleksi lebih mendalam agar bantuan dan stimulan menjadi tepat sasaran.
- b. Perlunya sistem pengendalian dan monitoring agar pelayanan yang diberikan tepat sasaran atau penerima pelayanan benar-benar memperoleh pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Dalam hal ini dilakukan pembinaan terhadap organisasi sosial lokal yang menangani permasalahan kesejahteraan sosial serta memberdayakan organisasi sosial lokal sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Sistem pendampingan menjadi penting, mengingat forum atau kelompok kerja yang dibentuk tidak dapat berjalan sendiri, sehingga fungsi kontrol dapat berjalan.
- c. Perlunya proses pembangunan yang berpusat pada manusia yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif, dalam hal ini Organisasi sosial lokal sebagai wadah partisipasi masyarakat perlu dioptimalkan peranannya, dimulai dengan memfasilitasi gagasan atau ide-ide yang muncul dari aras bawah.
- d. Mengingat pelaksanaannya di tingkat grass root, maka perlu menciptakan *trust* dari penyandang dana dengan pelaksana program, demikian sebaliknya.

- e. Mengingat adanya Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) dalam konteks kebijaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia. Perlu dirumuskan alat, wadah, sarana maupun media yang efektif digunakan masyarakat untuk melaksanakan UKS secara berkelanjutan. Sebagai jaringan kerja kelembagaan sosial komunitas lokal baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang sengaja dibentuk untuk mensinergikan pelaksanaan tugas di bidang usaha kesejahteraan sosial seperti kelompok arisan, kelompok usaha bersama, lumbung desa dan nilai budaya lokal. Maka spirit yang terkandung dalam pembentukan WKSBM tetap mengedepankan pendekatan partisipatoris.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto, 2002. *Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta; LPEUI.
- Anonim, 2004. *Monografi Kelurahan Sirimau*. Ambon.
-, 1995. "Adat Pela Gandong. Ambon Dapat Tantangan" *Suara Merdeka*, 25 Januari.
-, 2004. *Pedoman Kasifikasi Orsos/LSM*. Jakarta; Direktorat PPKSMK
- Chamsyah, Bachtiar; 2002. *Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta; Balatbangsos.
- Departemen Pendidikan Nasional RI, 2000. *Lembaga Budaya Pela dan Gandong di Maluku*. Jakarta; Ditjen Kebudayaan.
- Departemen Sosial RI, 2003. *Panduan Umum Penyelenggara Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta; Direktorat PPKSMK.
- Horton, Paul B dan Chester L Hunt, 1987. *Sosiologi* (Terjemahan : Aminuddin Ram dan Tita Sobari). Jakarta; Erlangga.
- Nazir, M, 1988. *Matode Research*. Jakarta; Ghalia.
- Suharto, Edi, 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung; LSP STKS.
- Sumarjo dan Saharudin, 2003. *Modul Metode-Metode Partisipatif dalam Pembangunan Masyarakat*. Bogor; Fakultas Pertanian IPB.
- Tonny, Fredian & Bambang S. Utomo, 2003. *Modul Pengembangan Kelembagaan dan Modal Sosial*. Bogor; Fakultas Pertanian IPB.

BIODATA PENULIS :

Alit Kurniasari, alumni strata satu dari UNPAD Bandung Fakultas Psikologi Perkembangan, dan Magister IPB Program Studi Pengembangan Masyarakat. Saat ini menjabat sebagai Ajun Peneliti Madya pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI.